

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta 2012.
- Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru*, Bandung, PT Alumni, 2006.
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah, Maju Mundur*, Bandung, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mulyadi Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, teknik membuat dan permasalahannya)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 .
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, PT Bineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Umar, Dani. . *Putusan Pengadilan Non-Executable (Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN)*. Genta Press, Jakarta, 2015.
- Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, ghalia , Jakarta, 1998

B. Jurnal/ Tesis/ Website.

<https://www.kennywiston.com/mengenal-verstek-dan-verzet/>

Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978.

www.hukumonline, penjelasan soal putusan provisi, putusan sela, dan penetapan sementara,

www.ombudsman.go.id, *Ombudsman sebut 14 Persen Laporan Masyarakat Terkait Pelayanan BPN.*

C. Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Undang-Undang Pokok Agraria

